

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Besar (*Grand Theory*)

Dalam penelitian ini penulis mendasari teori yaitu *grand theory* (teori besar). Dalam penelitian ini *grand theory* yang akan dijadikan landasan penelitian ini adalah teori tingkat pengangguran terbuka, teori upah minimum dan teori kemiskinan. Teori besar (*grand theory*) menjadi landasan munculnya teori-teori lain yang bersifat makroekonomi atau bahkan lebih luas lagi.³⁴

Adapun penggambaran *grand theory* pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Grand theory*:

- a. Teori tingkat pengangguran terbuka dari Ibnu Khaldun dalam buku *Al Muqaddimah*,³⁵ yang menjelaskan bahwa pengangguran adalah bentuk pemborosan potensi manusia yang bertentangan dengan prinsip Islam tentang produktivitas dan kemaslahatan umum yang dapat menyebabkan kemiskinan.
- b. Teori upah minimum dari Ibnu Khaldun dalam buku *Al Muqaddimah*, yang menjelaskan bahwa upah yang adil akan mendorong pekerja untuk bekerja dengan produktif, sedangkan ketidakadilan dalam upah akan menurunkan semangat kerja dan merusak produktivitas. Berdasarkan hal tersebut pentingnya hubungan antara upah, produktivitas, dan stabilitas

³⁴ Ahmadprayudi, "Apa Itu Grand Theory, Middle Theory Dan Applied Theory," *Dr. Ahmad Prayudi, SE, MM* (blog), 8 Oktober 2023, <https://ahmadprayudi.blog.uma.ac.id/2023/10/08/apa-itu-grand-theory-middle-theory-dan-applied-theory/>.

³⁵ Masturi Irlham, LC dan Malik Supar, Lc., Abidun Zuhri, "Ksatriasyair_Kitab Muqaddimah_Ibnu Khaldun.pdf ., Pustaka AL-Kautsar."

ekonomi. Menurutnya, upah harus sebanding dengan pekerjaan dan hasilnya, dan ketidakadilan dalam upah bisa berdampak buruk terhadap masyarakat dan negara.

- c. Teori kemiskinan dari Ibnu Khaldun dalam buku *Al Muqaddimah*, yang menjelaskan bahwa kemiskinan bisa disebabkan oleh sistem ekonomi yang tidak adil, seperti monopoli, penimbunan barang, serta pajak yang tinggi. Ia menekankan pentingnya keberimbangan antara produksi, perdagangan, dan distribusi. Ketika pasar tidak berjalan semestinya, pekerjaan akan hilang, usaha terhenti, dan ini menyebabkan masyarakat jatuh dalam kemiskinan sistemik. Berdasarkan hal tersebut bahwa ketimpangan pendapatan dan kurangnya akses terhadap pekerjaan produktif adalah penyebab utama kemiskinan. Sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan pemberdayaan ekonomi umat melalui instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, dan pengembangan sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja.

B. Teori Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Dan Kemiskinan

Teori Ibnu Khaldun tentang tingkat pengangguran terbuka, upah minimum dan kemiskinan adalah pengangguran adalah indikator kemerosotan suatu peradaban (*umran*), karena tenaga kerja yang menganggur berarti hilangnya sumber pertumbuhan dan kemakmuran.

Dalam Islam, bekerja adalah fardhu kifayah dan bentuk 'ibadah. Tidak terserapnya tenaga kerja berarti pemborosan amanah dari Allah, dan negara berkewajiban menciptakan kondisi yang memungkinkan semua orang bekerja.

Selain itu, dalam perekonomian dan kebijakan publik yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan melalui distribusi sumber daya yang adil, peluang kerja, dan perlindungan sosial. Menurut teori ini, keberhasilan pembangunan ekonomi harus diukur dari sejauh mana masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti masyarakat miskin, memperoleh manfaat dari pembangunan.

Serta teori tingkat pengangguran terbuka menunjukkan bahwa menurunnya tingkat pengangguran seharusnya mengindikasikan peningkatan kesempatan kerja, yang pada gilirannya mengarah pada penurunan tingkat kemiskinan. Namun, penelitian empiris menunjukkan bahwa hubungan ini tidak selalu linier dan bergantung pada berbagai faktor kontekstual, termasuk kualitas pekerjaan yang tersedia dan kebijakan upah minimum.

Ibnu Khaldun membedakan antara mata pencaharian yang menghasilkan barang (seperti pertanian, kerajinan) dan jasa (seperti guru, hakim, imam). Ia menekankan bahwa upah harus proporsional dengan jasa atau nilai ekonomi yang diberikan. Beliau juga menyiratkan pentingnya keseimbangan antara upah dan daya beli agar pasar tetap hidup dan rakyat sejahtera. Ekonomi Islam mendorong keadilan dalam upah (*al-'adl fi al-ujrah*) dan menolak eksploitasi. Sistem Islam tidak hanya bergantung pada pasar, tetapi juga memiliki mekanisme moral dan institusional seperti zakat dan wakaf untuk menjamin kesejahteraan pekerja.

Kemiskinan menurut Ibnu Khaldun adalah akibat sistemik dari ketimpangan kekuasaan, ketidakadilan dalam distribusi, dan rusaknya struktur pasar. Beliau menyebut bahwa: "Ketika pemerintah mengambil kekayaan rakyat secara berlebihan, perdagangan dan usaha mati, dan rakyat menjadi miskin." Menurut sistem Islam, kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi masalah akhlak dan sosial. Oleh karena itu, Zakat, infak, sedekah, dan wakaf berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan. Negara Islam (dalam kerangka khilafah atau *dawlah Islamiyah*) wajib menjaga keseimbangan ekonomi dan perlindungan kelompok lemah.

Teori tersebut menekankan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan sosial ekonomi yang kompleks yang disebabkan oleh kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak dan ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam konteks penelitian ini, menjelaskan bagaimana peningkatan kesempatan kerja dan kebijakan upah minimum yang adil dapat membantu mengurangi kemiskinan. Mengurangi pengangguran terbuka dan menaikkan upah minimum dapat meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan kekayaan, dan mengurangi kemiskinan.³⁶

C. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah jumlah penduduk yang secara aktif mencari pekerjaan namun belum dapat memperoleh pekerjaan dalam jangka

³⁶ Pedro Conceição, "Human development report 2020-the next frontier: Human development and the anthropocene," *United Nations Development Programme: Human Development Report*, 2020, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4418010.

waktu tertentu.³⁷ Menurut Arif dalam perekonomian Islam, Islam melarang monopoli dan ketidakadilan yang dapat menghilangkan kesempatan bagi orang-orang yang kurang beruntung. Hal ini terkait dengan konsep *maslaha* (kepentingan umum) yang menitikberatkan pada kesejahteraan seluruh masyarakat. Menciptakan lapangan pekerjaan dapat berkontribusi dengan zakat. Zakat tidak hanya berbentuk bantuan langsung, tetapi juga dapat digunakan untuk menyediakan dana bagi para pengangguran untuk memulai usaha atau bekerja sendiri. Misalnya kelompok penerima zakat seperti *garim* (orang yang berhutang) dan *fi sabilah* (di jalan Allah) bisa diberdayakan untuk melawan pengangguran.

Islam menekankan pentingnya pemerataan sumber daya alam dan kekayaan, agar peluang pekerjaan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang. Pengangguran seringkali disebabkan oleh struktur ekonomi yang tidak adil seperti riba. Sistem riba menyulitkan orang-orang yang tidak punya modal atau berhutang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau berkembang. Dengan melarang riba, Islam bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif di mana peluang usaha dan lapangan kerja terbuka bagi semua kelompok tanpa adanya eksploitasi.³⁸

Berdasarkan teori Ibnu Khaldun tentang pengangguran terbuka menyebut bahwa pengangguran adalah indikator kemerosotan suatu peradaban

³⁷ Luk Luk Annisatul Mufida dan Muhammad Safar Nasir, "Analisis Dinamis Tingkat Pengangguran di Indonesia," *Journal of Macroeconomics and Social Development* 1, no. 1 (2023): 1–14.

³⁸ Arif, *Ekonomi Islam, Pengantar dalam memahami konsep dan prinsip-prinsip Ekonomi Islam*.

(*umran*), karena tenaga kerja yang menganggur berarti hilangnya sumber pertumbuhan dan kemakmuran.

Dalam Islam, bekerja adalah *fardhu kifayah* dan bentuk ‘ibadah. Tidak terserapnya tenaga kerja berarti pemborosan amanah dari Allah, dan negara berkewajiban menciptakan kondisi yang memungkinkan semua orang bekerja. Berdasarkan hal tersebut, ketika tingkat pengangguran turun, jumlah orang yang memiliki pekerjaan meningkat, sehingga pendapatan masyarakat bertambah dan tingkat kemiskinan berkurang.³⁹ Sebaliknya, ketika perekonomian mengalami perlambatan atau resesi, tingkat pengangguran cenderung meningkat karena perusahaan berusaha mengurangi jumlah pekerja untuk menghemat biaya produksi.⁴⁰ Selain pertumbuhan ekonomi, faktor lain yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka adalah pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja, serta kebijakan pasar tenaga kerja pemerintah. Program pelatihan dan penciptaan lapangan kerja, dapat menjadi langkah strategis dalam mengurangi kemiskinan.

Dampak pengangguran terbuka sangat terasa pada perekonomian. Pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi seperti menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya kemiskinan dan ketidakstabilan sosial. Selain itu, pengangguran juga dapat menyebabkan pemborosan sumber daya manusia dan menghambat

³⁹ Mankiw, *Principles of economics*.

⁴⁰ Rizki Ardian, Muhamad Syahputra, dan Deris Desmawan, “Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 1, no. 3 (2022): 190–98.

pertumbuhan ekonomi jangka panjang.⁴¹ Pengangguran biasanya dibagi menjadi empat jenis, tergantung pada kondisi yang menyebabkannya, seperti:

1. Pengangguran friksional adalah jenis pengangguran yang terjadi bukan karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan tetapi karena mereka sedang mencari posisi yang lebih baik.
2. Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang disebabkan merosotnya harga komoditas sebagai akibat dari siklus naik turun ekonomi sehingga permintaan pekerja berkurang dari pada penyediaan pekerja.
3. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi secara alami karena penurunan kualitas beberapa komponen produksi sehingga menurunnya jumlah karyawan yang diberhentikan dari kegiatan produksi.
4. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang muncul karena mesin industri yang menggantikan manusia, atau sering disebut sebagai industrialisasi.

Sementara, berdasarkan karakteristiknya, pengangguran dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka terjadi karena adanya peningkatan pengangguran kesempatan kerja yang menurun daripada pertumbuhan jumlah tenaga kerja, tentu saja hal ini akan mengakibatkan banyak orang yang tidak menerima kerja.

⁴¹ Indah Purboningtyas dkk., "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Sainika Unpam: Jurnal Sains Dan Matematika Unpam* 3, no. 1 (2020): 81.

2. Pengangguran Selama Waktu Musiman

Pengangguran ini terjadi secara berkala dalam setahun. Pengangguran jenis ini umumnya terjadi di sektor pertanian. Saat menunggu masa, petani akan menganggur, tanam, serta waktu antara musim tanam dan panen.

3. Tingkat Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini terjadi dalam situasi di mana jenis jumlah orang yang bekerja menjalankan kegiatan ekonomi lebih dari yang dibutuhkan.

4. Setengah Orang Masih Menganggur

Situasi di mana seseorang bekerja lebih dari jam kerja mereka jam kerja normal di Indonesia, karena jam kerja adalah 35 jam seminggu, jadi pekerja yang bekerja di bawah 35 jam seminggu termasuk dalam golongan setengah menganggur.

Untuk mengatasi masalah pengangguran terbuka, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif dan terkoordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain: ⁴²

1. Stimulasi Ekonomi: Pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.
2. Pelatihan dan Pendidikan: Program pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dapat membantu meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan meningkatkan kesempatan kerja.

⁴² Fanny Cantika Roseline dan Emi Maimunah, "Analisis Pengaruh Pdrb Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt), Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung," *Cakrawala Repositori IMWI* 5, no. 2 (2022): 227–40.

3. Kebijakan Fleksibilitas Tenaga Kerja: Kebijakan yang mendukung fleksibilitas tenaga kerja, seperti kontrak kerja fleksibel dan magang, dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran terutama di kalangan pemuda dan *fresh graduate*.
4. Pendukung Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran.
5. Kolaborasi dengan Sektor Swasta: Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam program pelatihan dan penciptaan lapangan kerja dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengatasi pengangguran.

D. Upah Minimum

Upah dikenal sebagai gaji. Upah adalah pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja sebagai kompensasi atas upaya mereka selama proses produksi. Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah* karena *al-ajru* berarti *iwad*, jadi *al-sawab* (pahala) juga disebut *al-ajru* atau *al-ujrah* yaitu imbalan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas keuntungan yang dihasilkan dari suatu pekerjaan. Secara keseluruhan, konsep pengupahan dalam ekonomi Islam menitikberatkan pada keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab moral pengusaha terhadap pekerjanya. Upah yang adil dan tepat waktu menjaga stabilitas sosial dan mendorong kesejahteraan kolektif, sejalan dengan tujuan syariah (*Maqasid al-Syariah*) yang mengutamakan kepentingan kemanusiaan.⁴³

⁴³ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Arjasa Pratama, 2020).

Dalam ekonomi islam, upah minimum yang rendah atau tidak sesuai dengan kebutuhan hidup juga tidak mencerminkan prinsip *al-kifayah* (kecukupan), yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, dalam kerangka ekonomi syariah, pengurangan TPT dan penetapan upah minimum yang adil merupakan instrumen penting dalam mengatasi kemiskinan. Pemerintah dan pelaku ekonomi dituntut untuk menciptakan sistem kerja yang inklusif, mendukung kewirausahaan berbasis syariah, dan memastikan distribusi pendapatan yang adil. Dengan begitu, tercipta masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*).⁴⁴

Dalam teori Ibnu Khaldun tentang upah minimum, beliau membedakan antara mata pencaharian yang menghasilkan barang (seperti pertanian, kerajinan) dan jasa (seperti guru, hakim, imam). Beliau menekankan bahwa upah harus proporsional dengan jasa atau nilai ekonomi yang diberikan. Pentingnya keseimbangan antara upah dan daya beli agar pasar tetap hidup dan rakyat sejahtera. Ekonomi Islam juga mendorong keadilan dalam upah (*al- 'adl fi al-ujrah*) dan menolak eksploitasi. Sistem Islam tidak hanya bergantung pada pasar, tetapi juga memiliki mekanisme moral dan institusional seperti zakat dan wakaf untuk menjamin kesejahteraan pekerja.⁴⁵

⁴⁴ Zulaikah, "Implementasi Maqashid Al-Syariah Dalam Penetapan Upah Minimum Pekerja Berbasis Keadilan."

⁴⁵ Masturi Irlham, LC dan Malik Supar, Lc., Abidun Zuhri, "Ksatriasyair_Kitab Muqaddimah_Ibnu Khaldun.pdf ., Pustaka AL-Kautsar."

Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa peningkatan upah minimum akan mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, terutama bagi pekerja berupah rendah.⁴⁶ Kebijakan kenaikan upah minimum bertujuan untuk menjamin pendapatan yang layak sehingga pekerja mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan, yang pada akhirnya dapat membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan. Jika meningkatkan daya beli, upah minimum juga berpotensi mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat.

Namun, efektivitasnya dalam menurunkan kemiskinan bergantung pada faktor-faktor lain seperti inflasi, kondisi pasar kerja, dan seberapa luas kebijakan tersebut mencakup pekerja di sektor informal. Apabila upah minimum ditetapkan terlalu rendah, dampaknya mungkin tidak signifikan dalam mengurangi kemiskinan, sedangkan jika terlalu tinggi, bisa memicu peningkatan pengangguran yang justru memperburuk kemiskinan.⁴⁷

Selain itu, kebijakan upah minimum harus memperhitungkan perbedaan biaya hidup antar daerah. Upah minimum yang terlalu rendah di daerah dengan biaya hidup tinggi tidak akan cukup untuk mengentaskan kemiskinan, sementara upah yang terlalu tinggi di daerah dengan ekonomi lemah bisa mengakibatkan penurunan investasi atau pemutusan hubungan

⁴⁶ Stiglitz, Joseph E. *People, power, and profits: Progressive capitalism for an age of discontent*. Penguin UK, 2019. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=70WFDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT6&dq=Stiglitz,+J.+E.+\(2019\).+People,+Power,+and+Profits:+Progressive+Capitalism+for+an+Age+of+Discontent.+W.W.+Norton+%26+Company.&ots=fX5Ymp7QAg&sig=DglQN2e1oVeVouQfYZaXuNWOM8E](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=70WFDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT6&dq=Stiglitz,+J.+E.+(2019).+People,+Power,+and+Profits:+Progressive+Capitalism+for+an+Age+of+Discontent.+W.W.+Norton+%26+Company.&ots=fX5Ymp7QAg&sig=DglQN2e1oVeVouQfYZaXuNWOM8E).

⁴⁷ Diynna Rahmawati dan Asnita Frida Sebayang, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan Ekstrem," *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2023, 93–100.

kerja. Oleh karena itu, penyesuaian regional dalam penetapan upah minimum sangat penting agar kebijakan ini relevan dan efektif dalam mengurangi kemiskinan. Kombinasi kebijakan upah minimum dengan program perlindungan sosial, seperti bantuan tunai dan pelatihan keterampilan, juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara lebih holistik.⁴⁸

Berdasarkan jenisnya, upah minimum terbagi dalam dua golongan, diantaranya yaitu:⁴⁹

1. Upah Minimum Regional

Upah Minimum Regional adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa. Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam (KEP-226/MEN/2000), upah minimum regional dibagi menjadi dua, yakni Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota.

2. Upah Minimum Sektoral

Upah minimum sektoral adalah upah yang resmi dalam suatu provinsi berdasarkan kemampuan sektor. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam (KEP-226/MEN/2000), Upah Minimum Sektoral dibedakan menjadi dua kategori, yaitu Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMS kab/kota).

⁴⁸ Damar Jati dkk., “Pengaruh Pengangguran, Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua,” *SJEE (Scientific Journals of Economic Education)* 8, no. 2 (2024): 38–44.

⁴⁹ “Jdih Kemnaker,” diakses 12 September 2024, <https://jdih.kemnaker.go.id/katalog-1883-Peraturan%20Menaker.html>.

Upah merupakan salah satu komponen yang menentukan harga pokok perusahaan, ketidaktepatan dalam menentukan upah akan sangat merugikan perusahaan. Akibatnya, ada beberapa faktor-faktor penting yang memengaruhi tingkat upah, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Pendidikan dan Keterampilan

Upah berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan atau keterampilan karyawan. Perusahaan biasanya mempertimbangkan tingkat pendidikan karyawan saat menentukan struktur dan skala upah.

b. Jabatan dan Tanggung Jawab

Peran jabatan dan tanggung jawab sangat penting dalam menentukan besar kecilnya upah. Jabatan dan tanggung jawab biasanya memiliki upah yang lebih tinggi.

c. Masa Kerja

Keterampilan dan pengalaman yang lebih baik biasanya akan diperoleh dari waktu kerja yang lebih lama, sehingga upah yang diterima juga akan meningkat.

d. Kemampuan Perusahaan

Kemampuan perusahaan untuk menentukan tingkat upah yang tepat adalah faktor utama yang menentukan besarnya upah yang diterima pekerja. Perusahaan yang tidak dapat membayar upah yang layak dapat menghadapi masalah seperti insolvensi.

e. Keterampilan dan Sertifikasi

Kualifikasi pendidikan atau sertifikasi kompetensi bervariasi dalam gaji; tingkat keterampilan dan sertifikasi yang lebih tinggi akan dibayar lebih tinggi.

2. Faktor eksternal

a. Kondisi Pasar Tenaga Kerja

Kondisi pasar tenaga kerja dapat berdampak pada harga pekerjaan. Jika penawaran tenaga kerja rendah dan permintaan tenaga kerja tinggi, posisi tawar-menawar tenaga kerja rendah dan tingkat upah rendah. Sebaliknya, jika penawaran tenaga kerja tinggi dan permintaan tenaga kerja rendah, posisi tawar-menawar tenaga kerja tinggi dan tingkat upah akan meningkat.

b. Regulasi Pemerintah

Upah minimum ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin bahwa pekerja menerima upah yang memungkinkan kehidupan yang layak. Perusahaan harus menyesuaikan struktur dan tingkat upah operasional mereka dengan kenaikan upah minimum.

c. Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Standar kebutuhan hidup bulanan yang diperlukan oleh karyawan lajang untuk hidup dengan layak secara fisik dikenal sebagai KHL. Menteri Ketenagakerjaan mempertimbangkan KHL untuk menaikkan upah minimum.

d. Peran Serikat Pekerja

Peran serikat pekerja sangat penting dalam menentukan besar kecilnya upah. Untuk menentukan tingkat upah yang layak, serikat pekerja dapat melakukan perjanjian kerja bersama (PKB) dengan perusahaan.

e. Kompensasi Rata-Rata

Upah rata-rata di pasaran adalah upah yang dibayarkan oleh banyak perusahaan untuk pekerjaan dan golongan jabatan yang sama. Kenaikan upah rata-rata di pasar dapat memengaruhi seberapa besar atau kecil gaji yang diberikan oleh sebuah perusahaan.

f. Biaya Hidup

Biaya hidup di suatu daerah dapat mempengaruhi besar kecilnya upah yang diberikan. Perusahaan harus menyesuaikan upah mereka dengan biaya hidup di daerah tersebut untuk memastikan bahwa karyawan mereka dapat hidup dengan layak.

E. Kemiskinan

Kemiskinan dalam pandangan islam adalah tidak terpenuhinya kebutuhan kebutuhan primer secara menyeluruh. Faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan terdiri dari kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, tingkat kesehatan yang dapat diterima, dan kurangnya aset kesehatan. Kemiskinan juga dikaitkan dengan terbatasnya kesempatan kerja: masyarakat yang tergolong

miskin (*the Poor*) biasanya merupakan pengangguran (*unemployed*) dan umumnya mempunyai tingkat pendidikan dan kesehatan yang kurang.⁵⁰

Yusuf Al-Qaradawi, dalam bukunya *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*, mengidentifikasi bahwa kemiskinan dapat menjadi ancaman bagi akidah, akhlak, dan stabilitas sosial. Beliau menekankan peran instrumen keuangan syariah seperti zakat, infak, dan sedekah dalam mengatasi kemiskinan dan mendorong terciptanya keadilan sosial. Dalam prinsip-prinsip syariah juga ditekankan keadilan sosial dan penghindaran riba, dapat menjadi dasar yang kuat untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil.⁵¹

Teori Kemiskinan dari Ibnu Khaldun, yang menyatakan bahwa dampak kemiskinan akibat sistemik dari ketimpangan kekuasaan, ketidakadilan dalam distribusi, dan rusaknya struktur pasar ketimpangan pendapatan dan kurangnya akses terhadap pekerjaan produktif adalah penyebab utama kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah serius terkait dengan ketimpangan distribusi kekayaan dan sumber daya. Islam mengedepankan keadilan sosial dan kemurahan hati melalui berbagai mekanisme seperti zakat, infaq, dan sedekah, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin serta sebagai bantuan finansial misalnya, zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk menyumbangkan sejumlah kecil hartanya kepada orang yang membutuhkan.⁵²

⁵⁰ Ronaldo Putra Pratama Sinurat, "Analisis faktor-faktor penyebab kemiskinan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Registratie* 5, no. 2 (2023): 87–103.

⁵¹ Samsudin dkk., "Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia; Telaah Dan Rekomendasi Kebijakan Perspektif Syariah."

⁵² Masturi Irlham, LC dan Malik Supar, Lc., Abidun Zuhri, "Ksatriasyair_Kitab Muqaddimah_Ibnu Khaldun.pdf ., Pustaka AL-Kautsar."

Selain itu, penanggulangan kemiskinan juga dikaitkan dengan penekanan pada praktik ekonomi yang halal dan beretika, dimana setiap orang diberi kesempatan untuk hidup bermartabat. Kesetaraan kesempatan, perlindungan hak-hak pekerja. Ini adalah salah satu cara untuk mendorong redistribusi kekayaan dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, Islam melarang riba (bunga berlebihan). Riba seringkali mengarah pada eksploitasi terhadap masyarakat miskin dan memperburuk kemiskinan. Sistem ini dirancang untuk memastikan kekayaan didistribusikan secara lebih merata, bukan terkonsentrasi di tangan segelintir orang.⁵³

Penyebab utama kemiskinan disebabkan oleh faktor alam. Beberapa orang menjadi miskin karena mereka dilahirkan dalam keluarga miskin. Kemiskinan tidak hanya mempersulit pemenuhan kebutuhan dasar mereka, namun juga membuat status sosial mereka tidak dapat dikembangkan lebih lanjut, karena kemiskinan adalah sebuah rantai, dan jika dibiarkan maka kemiskinan akan selalu ada.⁵⁴

Kemiskinan memiliki dampak yang luas dan kompleks pada banyak aspek kehidupan, termasuk meningkatnya pengangguran, putus sekolah, masalah kesehatan, kejahatan, kematian, dan konflik sosial. Dampak-dampak ini dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan sosial serta mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar subsisten. Menurut

⁵³ Syahrial Shaddiq dkk., “Buku Ekonomi Syariah & Pengentasan Kemiskinan (Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari)” (CV. Sari Mulia Indah), diakses 27 September 2024, <https://repositori.ulm.ac.id/handle/123456789/33555>.

⁵⁴ Busyairi Ahmad, “Dampak Kultur Terhadap Lifestyle Masyarakat Nelayan (Analisis Kemiskinan Kultural pada Masyarakat Nelayan),” *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi* 4, no. 1 (2022): 1–17.

banyak pendapat, seseorang dianggap miskin dapat diukur dengan beberapa cara, yaitu kekurangan materi (sandang, papan, pangan), tidak bisa memenuhi kebutuhan sosial dan kurangnya pendapatan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dan keterampilan, kesehatan, kemandirian masyarakat, serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan dalam penanggulangan kemiskinan.⁵⁵

Menurut Ali Khomsan dkk, dalam buku yang berjudul Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin, ada beberapa jenis kemiskinan yakni:⁵⁶

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah keadaan individu yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang tidak merata dan gagal menjangkau seluruh masyarakat.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural ditandai dengan pola hidup berfoya-foya, tidak memiliki tabungan, dan sikap tidak mau berusaha keluar dari keadaan miskin. Karena budayanya, persentase penduduk miskin di Indonesia terus

⁵⁵ Johan Arifin, "Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia," *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 6, no. 2 (2020): 114–32.

⁵⁶ Shaddiq dkk., "Buku Ekonomi Syariah & Pengentasan Kemiskinan (Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari)."

meningkat. Pada akhirnya, untuk mengurangi kemiskinan, setiap aspek kehidupan masyarakat harus diperbaiki.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan berasal dari struktur sosial yang ditetapkan dalam kelompok sosial tertentu dan mengacu pada terjadinya situasi di mana sumber daya yang tersedia secara praktis tidak dapat digunakan. Contoh kemiskinan struktural yang banyak terjadi di masyarakat, antara lain: Penggusuran dan pembukaan lahan yang dilakukan pemerintah di suatu wilayah mengakibatkan masyarakat setempat kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. Karena sumber daya alam di wilayah tersebut dikuasai oleh investor asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing, masyarakat di wilayah tersebut tidak mempunyai waktu untuk mencari pekerjaan atau kehilangan pekerjaan.